

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan di Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kinerja sektor publik merupakan hal terpenting dalam mewujudkan pembangunan nasional guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah, yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Agar pemerintahan yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka kualitas pelaksanaan kinerjanya harus ditingkatkan.

Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi, namun meliputi reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan Dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2011).

Fenomena masalah kinerja instansi di dalam pemerintah merupakan hal yang rutin terjadi. Seperti kasus Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang mendapat nilai C terkait akuntabilitas kerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk tahun 2015. Raihan

nilai tersebut menunjukkan masih kurangnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat akibat kerja PNS-nya yang rendah. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk bekerja keras lagi guna mendapatkan nilai yang lebih baik di tahun mendatang. Penilaian tersebut dilihat dari Laporan Kinerja Pegawai (Lakip) dengan sejumlah indikatornya, mulai dari kinerja pegawai, pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran sampai dengan evaluasi kegiatan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih memiliki kekurangan dalam melaksanakan program kegiatan di tahun anggaran. Kekurangan tersebut, mulai dari merumuskan tujuan, sasaran, merumuskan kunci keberhasilan, menentukan indikator untuk mencapai tujuan keberhasilan dan evaluasi kegiatan. Kelemahan lainnya terkait penentuan target program jangka pendek dan jangka panjang yang kaitannya dengan anggaran atinya bukan hanya melaksanakan program dan juga menghabiskan anggaran akan tetapi harus ada keberhasilan dan bukti nyata di tengah masyarakat setelah program itu dijalankan. ([www.pikiran-rakyat.com/2016/02/17](http://www.pikiran-rakyat.com/2016/02/17)).

Fenomena lainnya yaitu LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (penjara) Jawa Barat meminta Bupati Bandung Barat Abubakar bertanggung jawab atas sepuluh Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai bermasalah. Kepala Bidang Investigasi LSM Penjara Jawa Barat. Meminta Bupati Bandung Barat harus menindak anak buahnya di 10 SKPD yang dinilai bermasalah. Sejumlah SKPD tersebut, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Perairan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, serta

DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat. Disebutkan bahwa, masalah di Dinas Pendidikan diantaranya soal tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan profesi yang disalurkan ke PNS SD yang tidak sesuai dengan kriteria pada 2014 lalu. Selain itu, adanya rekayasa lelang pada sejumlah proyek di Dinas Pendidikan pada 2014. Di Dinas Kesehatan, masalah kelebihan pembayaran pada proyek pengadaan alat kesehatan tahun 2014 serta rekayasa dalam pelelangan dilayanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Bandung Barat. Sementara di Dinas Bina Marga, juga terdapat indikasi korupsi belanja modal konstruksi. ([www.pikiran-rakyat.com/2015/08/03](http://www.pikiran-rakyat.com/2015/08/03)).

Berdasarkan fenomena di atas, dapat ditelaah bahwa masih ada kelemahan dalam kinerja instansi pemerintah daerah. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang dilakukan pemerintah yang banyak merugikan masyarakat.

Sistem Informasi Pengelolaan SKPD merupakan sistem informasi akuntansi bagi pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keberhasilan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah tidak terlepas dari peran kualitas sistem informasi akuntansi. Sistem informasi manajemen daerah merupakan bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta

akuntabilitas laporan keuangan. Aplikasi Sistem informasi manajemen daerah mampu menghasilkan informasi dengan ketepatan atau tingkat kebenaran yang lebih baik bila dibandingkan dengan pengolahan data manual dan membantu pimpinan dalam mengambil keputusan sesuai data dan informasi yang ada. Adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu tugas aparatur pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas laporan keuangan serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah. (Nur Jannah Abdi Aziz, Umi Pratiwi, dan Eko Suyono. 2018).

Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Azhar Susanto 2013:72).

Keberhasilan Kinerja Instansi Pemerintah daerah tidak terlepas dari peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran - ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai

bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. (Chici, 2017).

Menurut PP 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor untuk menciptakan nilai di suatu pemerintahan adalah komitmen yang dibuat oleh semua komponen - komponen individual dalam menjalankan operasional pemerintahan. Komitmen tersebut dapat tercipta apabila pegawai sadar akan hak dan kewajibannya dalam pemerintahan tanpa melihat jabatan dan kedudukannya, karena pencapaian kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kerja sama dari semua pegawai. (Yuni, 2016)

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu beserta tujuannya dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. (Cepi Triatna 2015:120).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Chici Claraini dengan judul “Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. (Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Rokan Hilir)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan

berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Penulis saat ini menggunakan objek yang berbeda yaitu SKPD di Kabupaten Bandung Barat.

Adapun perbedaan yang dilakukan penulis atas penelitian ini yaitu dilaksanakan pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat, berbeda dengan penelitian yang sebelumnya dilaksanakan pada SKPD di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun perbedaan variabel dimana Chici Claraini menggunakan variabel independennya *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan sedangkan penulis menggunakan variabel independennya kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi,serta perbedaan pada variabel dependen yang digunakan Chici Claraini yaitu kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir sedangkan penulis menggunakan dependen pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas Sistem Informasi Akuntansi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana Komitmen Organisasi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
4. Bagaimana Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Seberapa besar pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah secara parsial pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Seberapa besar pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah secara simultan pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Sistem Informasi Akuntansi pada Insantansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Komitmen Organisasi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah secara parsial pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah secara simultan pada Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

#### 1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah kinerja instansi pemerintah khususnya kualitas sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi.

#### 2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pemasukan dan tambahan informasi bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

#### 3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang Sistem yaitu mengenai kualitas sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. bagi Akademisi.

#### 4. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi

mahasiswa/pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan sistem yang menyangkut kualitas sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

#### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan sistem, khususnya mengenai kualitas sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Jalan. Padalarang-Cisarua Km.2, Ngamprah, Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552.